**Bangunkan Raksasa Tidur: DPD RI sebagai Game Changer Indonesia 2045**

Pernahkah Anda memperhatikan pengumuman hasil Pilkada atau Pileg di televisi? Saat penyiar menyebut nama-nama pemenang DPR, suasana terasa meriah. Tapi begitu giliran DPD RI, entah kenapa rasanya... datar. Seolah-olah hanya formalitas belaka. Padahal, anggota DPD RI yang terpilih itu meraih ratusan ribu bahkan jutaan suara dari rakyat—jauh lebih banyak dari anggota DPR.

Inilah paradoks yang sudah terlalu lama kita biarkan. **DPD RI, lembaga dengan legitimasi demokratis tinggi, justru seperti raksasa yang tertidur pulas**. Sementara Indonesia Timur mulai bangkit dengan pertumbuhan ekonomi yang menakjubkan—Maluku Utara 20,49%, Papua 8,45%—suara daerah-daerah ini masih lemah mengema di Jakarta.

Bagaimana mungkin negara dengan 17.000 pulau bisa mewujudkan Indonesia Emas 2045 kalau representasi daerahnya cuma dijadikan "penasehat" yang sering diabaikan? Sudah saatnya kita bangunkan raksasa tidur ini.

**Cerita tentang legitimasi tinggi, kekuasaan rendah**

Tahun 2019, saya sempat mengobrol dengan seorang anggota DPD RI dari Sulawesi. Dia bercerita betapa frustrasinya. "Mas, suara saya itu jutaan loh. Lebih besar dari anggota DPR mana pun di daerah saya. Tapi begitu di Jakarta, suara saya cuma jadi 'masukan' yang bisa dibuang begitu saja."

Itulah realitas pahit DPD RI saat ini. Mereka punya legitimasi demokratis yang luar biasa—152 anggota terpilih langsung dari 38 provinsi dengan total ratusan juta suara rakyat. Tapi secara konstitusional, mereka cuma bisa "memberikan pertimbangan." Tidak bisa memutuskan. Tidak bisa memveto. Bahkan untuk RUU yang menyangkut kepentingan daerah, suara mereka sering diabaikan DPR.

Bandingkan dengan Senat Amerika Serikat. Mereka cuma 100 orang, tapi punya kekuatan setara dengan House of Representatives. Atau Bundesrat Jerman yang bisa memveto 50% legislasi yang berkaitan dengan kepentingan negara bagian. Sementara DPD RI? Pakar Hukum UGM, Dr. Zainal Arifin Mochtar, menyebutnya sebagai fenomena **"legitimasi tinggi tapi otoritas rendah."**

Yang lebih ironis lagi, DPD RI mengawasi transfer daerah senilai Rp 857,6 triliun—seperempat dari total belanja negara. Tapi tidak punya kekuatan untuk memastikan uang sebesar itu digunakan secara optimal untuk kemajuan daerah.

**Ketika daerah mulai bersuara lebih keras**

Belakangan ini saya sering membaca berita-berita menarik dari Indonesia Timur. Bukan lagi berita tentang kemiskinan atau keterisolasian. Justru sebaliknya—berita tentang ledakan pertumbuhan ekonomi yang bikin iri.

Maluku Utara tumbuh 20,49% dalam setahun. Angka yang bahkan lebih tinggi dari China di masa jayanya. Papua dengan segala potensi mineralnya mencatat pertumbuhan 8,45%. Kalimantan Timur, calon lokasi ibu kota baru, menarik investasi miliaran dolar dan tumbuh 6,22%.

Tapi yang bikin saya terkesan bukan cuma soal angka. Melainkan bagaimana daerah-daerah ini mulai berani bermimpi besar. Sulawesi Tengah dengan investasi $7,2 miliar-nya mulai bicara soal menjadi pusat industri nikel dunia. Papua dengan 36% produksi nikel global tidak lagi mau sekadar jadi pemasok bahan mentah.

**Ini bukan lagi Indonesia yang Jakarta-sentris.** Daerah-daerah sudah mulai punya bargaining power ekonomi. Pertanyaannya: apakah representasi politik mereka juga sudah setara?

Di sinilah peran DPD RI seharusnya menguat. Mereka adalah suara langsung dari daerah-daerah yang sedang bangkit ini. Sayangnya, suara itu masih teredam oleh sistem politik yang belum mengakui perubahan realitas ekonomi Indonesia.

**Teknologi yang mengubah segalanya**

Ada yang menarik dari percakapan saya dengan seorang staf DPD RI tahun lalu. Dia menunjukkan aplikasi di laptopnya yang bisa memantau aspirasi dari 38 provinsi secara real-time. "Setiap hari masuk ribuan masukan dari daerah. Tapi ya itu, kita cuma bisa 'meneruskan' ke DPR. Tidak bisa memutuskan apa-apa."

Padahal, teknologi itu menunjukkan potensi luar biasa. Bayangkan kalau platform seperti itu dikembangkan lebih jauh. DPD RI bisa jadi **neural network** yang menghubungkan aspirasi daerah dengan kebijakan nasional secara langsung.

Saya teringat Estonia—negara kecil yang berhasil mentransformasi demokrasi mereka lewat teknologi. 51% warga negara mereka sudah memilih secara elektronik. Platform Rahvaalgatus.ee memungkinkan 1.000 tanda tangan digital langsung masuk agenda parlemen. Sistem X-Road menyediakan akses terpadu ke semua layanan pemerintah.

Indonesia sebenarnya sudah mulai bergerak ke arah sana. Indeks SPBE kita melonjak dari 2,34 ke 3,12 dalam dua tahun. Proyek Palapa Ring senilai $1,5 miliar sudah menghubungkan 500+ kabupaten dengan kecepatan hingga 100 Gbps. Portal Satu Data Indonesia mulai mengintegrasikan informasi lintas kementerian.

**Yang kurang hanya satu: political will untuk memanfaatkan teknologi ini mengoptimalkan peran DPD RI.**

Dengan infrastruktur digital yang sudah ada, DPD RI bisa menjadi lembaga pertama di dunia yang menerapkan "big data democracy" untuk representasi regional. Bayangkan sistem AI yang menganalisis aspirasi 270 juta rakyat dari 38 provinsi secara real-time. Dashboard interaktif yang memantau implementasi program pembangunan daerah. Platform konsultasi digital yang menghubungkan DPD langsung dengan masyarakat di seluruh nusantara.

Teknologinya sudah ada. Infrastrukturnya sudah dibangun. Yang dibutuhkan cuma keberanian untuk menggunakannya.

**Indonesia 2045: momentum yang tidak boleh terlewat**

Dua tahun lalu, saat RPJPN 2025-2045 disahkan, saya merasa optimis. Targetnya ambisius: menjadikan Indonesia negara maju dengan PDB per kapita USD 23.000-30.300. Ekonomi terbesar kelima dunia. Kontribusi Indonesia Timur naik jadi 28,5% dari PDB nasional.

Tapi kemudian saya bertanya: siapa yang akan memastikan pembangunan itu benar-benar merata? Siapa yang akan menjadi garda terdepan memperjuangkan agar desa-desa di Papua, pulau-pulau di Maluku, atau pedalaman Kalimantan tidak tertinggal?

Presiden dan DPR dengan segala kewenangannya memang penting. Tapi mereka berpikir nasional, kadang lupa detail di daerah. **DPD RI-lah yang seharusnya menjadi jembatan antara visi besar Indonesia 2045 dengan realitas di lapangan.**

Sayangnya, dengan kewenangan terbatas seperti sekarang, peran mereka tidak optimal. DPD RI bisa saja mengawasi triliun rupiah dana transfer daerah. Tapi kalau ada penyimpangan atau ketidaktepatan alokasi, mereka tidak bisa berbuat banyak selain "menyampaikan" ke DPR.

Bayangkan kalau situasinya berbeda. DPD RI dengan kewenangan yang diperkuat bisa menjadi **quality control**pembangunan Indonesia. Mereka bisa memastikan setiap rupiah anggaran daerah benar-benar sampai ke rakyat. Mereka bisa menjadi mediator konflik antardaerah. Bahkan menjadi koordinator investasi lintas provinsi.

**Asta Cita pemerintahan saat ini—pembangunan dari desa, hilirisasi industri, ketahanan pangan dan energi—semuanya butuh representasi daerah yang kuat.** DPD RI yang optimal bisa menjadi ujung tombak program-program ini.

**Saatnya bangun dan bergerak**

Akhir-akhir ini saya sering membaca pernyataan Ketua DPD RI, Sultan Baktiar Najamudin, tentang perlunya amendemen kelima UUD 1945. Awalnya saya skeptis. "Ah, lagi-lagi politisi mau menambah kekuasaan," pikir saya.

Tapi setelah melihat data dan realitas di atas, saya mulai mengerti. **Ini bukan soal ambisi politik. Ini soal efektivitas representasi.**

Dua puluh tahun DPD RI berdiri dengan kewenangan terbatas sudah cukup membuktikan: "bikameralisme lemah" tidak berfungsi optimal untuk negara sebesar Indonesia. Kita butuh sistem yang memberikan daerah kekuatan nyata dalam menentukan masa depan mereka.

Estonia berhasil mentransformasi demokrasi mereka dalam 15 tahun. Taiwan menciptakan model partisipasi digital yang mendunia. Jerman dengan Bundesrat-nya membuktikan bahwa representasi regional yang kuat justru memperkuat persatuan nasional.

**Indonesia punya potensi lebih besar dari mereka semua.** Dengan 17.000 pulau, 1.300 suku, dan kekayaan sumber daya yang luar biasa, kita seharusnya bisa menciptakan model demokrasi representatif yang paling inovatif di dunia.

Yang dibutuhkan hanya keberanian untuk berubah. Keberanian mengakui bahwa sistem yang kita pakai 20 tahun terakhir belum optimal. Keberanian memberikan daerah kekuatan yang sebanding dengan legitimasi yang mereka miliki.

**Raksasa sudah terlalu lama tidur.** Indonesia 2045 tidak akan tercapai tanpa partisipasi aktif semua daerah. Dan partisipasi itu tidak akan efektif tanpa representasi yang kuat.

DPD RI, bangunlah. Indonesia menunggumu menjadi game changer sejati.